

**ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH PADA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN BERAU**

ASMAWATI

Asmawati.asmar13@gmail.com

STIE Muhammadiyah Tanjung Redeb

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian penyajian Laporan Keuangan Daerah pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau dengan Permendagri No.64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Alat analisis yang digunakan yaitu: Permendagri No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau telah sesuai berdasarkan Permendagri No.64 Tahun 2013. Komponen dari penyajian laporan Keuangan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau memakai basis akuntansi cash toward accrual dimana laporan realisasi anggaran berbasis kas dan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan neraca berbasis akrual. Menolak hipotesis yang telah diajukan sebelumnya, karena Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau dalam menyajikan Laporan Keuangan Daerah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Permendagri No.64 Tahun 2013.

Kata Kunci: Laporan Keuangan Daerah, Basis AkruaI, Basis Kas.

ABTRACT

The purpose of this study was to determine the extent of the suitability of the presentation of the Regional Financial Statements at the Secretariat of the Berau Regency KORPRI Management Team and Permendagri No. 64 of 2013 regarding Government Accounting Standards. The research analysis in this study is descriptive analysis. The instrument of this research namely Permendagri No. 64 of 2013 concerning the Application of Accrual-Based Government Accounting Standards to Local Governments. The results of this study indicate that the presentation of the financial statements of the Secretariat of the Berau Regency KORPRI Management team is in accordance with Permendagri No.64 of 2013. The component of the presentation of the financial statements of the Secretariat of the Berau Regency

KORPRI Management team is the Budget Realization Report, Balance Sheet, Operational Report, Equity Change Report and Notes on Financial Statements. The financial statements of the Secretariat of the Berau Regency KORPRI Management team use the basis of cash accounting toward accruals in which cash-based budget realization reports and operational reports, reports on changes in equity and accrual-based balance sheets. Based of the result of the study the hypothesis was rejected, it shown that that the Secretariat of the Berau Regency KORPRI Management Board in presenting the Regional Financial Report is in accordance with the Government Accounting Standards in Permendagri No. 64 of 2013.

Keywords: Regional Financial Report, Accrual Basis, Cash Base.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang sentralistis, menuju paradigma baru yang menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi dan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional maupun internasional.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam suatu periode pelaporan. Perubahan yang signifikan seiring dengan reformasi dibidang keuangan negara adalah perubahan dibidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuannya masing-masing. Perubahan dibidang akuntansi pemerintahan adalah pada standar akuntansi pemerintahan. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman

pada standar akuntansi pemerintahan adalah berguna untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Sebagai sebuah konsekuensi logis dari amanah yang dicantumkan pada Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, maka Menteri Dalam Negeri menerbitkan peraturan menteri yang mengatur tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah. Peraturan yang dimaksud, ialah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Permendagri inilah yang menjadi pedoman mengenai penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Terbitnya Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut selain untuk mewujudkan *good governance*, juga merupakan pedoman pelaporan keuangan yang dapat diterima umum yang telah diamanatkan oleh beberapa

peraturan perundang-undangan yang sebelumnya.

B. Rumusan Masalah

Apakah penyajian Laporan Keuangan Daerah pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau telah sesuai dengan Permendagri No.64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Akuntansi Pemerintahan

Menurut Pontoh (2013:1) menyatakan akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, pemrosesan data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya pada para pengambil keputusan.

2. Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar akuntansi pemerintahan ini telah ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan pelaporan keuangan daerah oleh pemerintah sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 dan diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010. Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah melalui Permendagri No.64 Tahun 2013, yang dipakai sebagai pedoman pelaporan keuangan pemerintah daerah hingga saat ini.

Laporan Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan daerah menurut Halim dan Kusufi (2013:43) adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukan.

Penyajian Laporan Keuangan Daerah Menurut Permendagri No.64 Tahun 2013

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode (Anonim, 2014:3).

Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LRA
- 2) Belanja
- 3) Transfer
- 4) Surplus/Defisit-LRA
- 5) Pembiayaan
- 6) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (Anonim, 2014:16).

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran X002F penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir (Anonim, 2014:4).

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya dengan pos-pos sebagai berikut:

- 1) Saldo anggaran lebih awal
- 2) Penggunaan saldo anggaran lebih
- 3) Sisa lebih/kurang pembiayaan Y anggaran tahun berjalan
- 4) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya
- 5) Lain-lain
- 6) Saldo anggaran

c. Neraca

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu (Anonim, 2014:4).

d. Laporan Operasional

Laporan operasional (LO) yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya (Anonim, 2014:4).

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas (LAK) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas

pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris (Anonim, 2014:18).

e. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas (LPE) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir (Anonim, 2014:4).

f. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas laporan keuangan (CaLK) adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai (Anonim, 2014:4).

KAJIAN EMPIRIS

Rodiansyah (2017) dengan judul penelitian: Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau, Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2015 sudah baik. Analisis varians belanja menunjukkan realisasi belanja Tahun 2013, 2014 dan 2015 lebih kecil dari anggarannya. Analisis pertumbuhan belanja menunjukkan pada Tahun 2013-2014 terdapat penurunan (negatif) namun pada Tahun 2014-2015 terdapat peningkatan (positif) yang besarnya melebihi penurunan pada Tahun 2013-2014.

METODE PENELITIAN

A. Definisi Operasional

Definisi operasional dari variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penelitian ini adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 dan penerapannya berdasarkan Permendagri No.64 Tahun 2013.
2. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau dalam rangka penyelenggaraan program kerjanya yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau.
3. Laporan Keuangan Daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kab. Berau yang memerlukannya. Laporan keuangan daerah tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

4. Laporan Realisasi Anggaran yaitu laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya dikelola oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kab. Berau. Unsur-unsurnya meliputi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan pada Tahun 2017.
5. Neraca yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas yang dimiliki oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau pada tanggal 31 Desember 2017.
6. Laporan Operasional yaitu laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam periode Tahun 2017.
7. Laporan Perubahan Ekuitas yaitu laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas yang dimiliki oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau pada Tahun 2017 dibandingkan dengan Tahun 2016.

B. Unit Analisis, Populasi dan Sampel

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau, yang beralamat di Jalan APT. Pranoto Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Laporan Keuangan Daerah pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau sejak berdirinya hingga Tahun 2017. Sampel yang digunakan dalam

penelitian ini adalah Laporan Keuangan Daerah pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau Tahun 2017. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *Nonprobability Sampling* (Sampel diambil tidak acak).

a. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, berupa Laporan Keuangan Daerah pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau Tahun 2017 dan data kualitatif, berupa sejarah dan gambaran umum Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau, struktur organisasi serta informasi yang relevan lainnya.

Sumber data yang digunakan berasal dari

1. Data primer, diperoleh berdasarkan wawancara dengan karyawan di kantor Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI, yang terkait dalam penyajian Laporan Keuangan Daerah pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau Tahun 2017.
2. Data sekunder, yaitu data-data yang berasal dari Laporan Keuangan Daerah pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau Tahun 2017.

C. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Wawancara.
2. Metode Dokumentasi.

D. Alat Analisis

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif. Alat analisis yang digunakan sebagai pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah Permendagri No.64 Tahun 2013

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah. Dalam SAP tersebut dijelaskan bahwa dalam penyajian laporan keuangan daerah terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau menyajikan rekening anggaran belanja dan realisasinya. Jumlah belanja yang dianggarkan sebesar Rp2.862.813.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.583.087.516,00 atau 90,23%. Realisasi anggaran pada Tahun 2017 tersebut terbagi atas kelompok belanja operasi dengan belanja pegawai sebesar 89,85% atau Rp939.621.937,00 dan belanja barang dan jasa sebesar Rp1.625.855.579,00 atau 90,49%, serta pada kelompok belanja modal dengan belanja modal peralatan dan mesin Rp17.610.000,00 atau 86,75%. Namun jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2016, maka dapat dilihat adanya penurunan belanja Tahun 2017 sebesar Rp445.071.709,00 atau 14,70%.

Pos-pos pada laporan realisasi anggaran telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam Permendagri No.64 Tahun 2013. Anggaran belanja telah dilaksanakan sesuai dengan struktur anggaran belanja. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas, belanja sudah diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis

belanja). Selisih lebih/kurang antara realisasi dan anggaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau pada Tahun 2017 telah menyajikan laporan realisasi anggaran dengan baik dan telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan

Neraca

Pada Anggaran per 31 Desember 2017 pada pos aset, jumlah aset lancar yaitu pada pos persediaan sebesar Rp481.500,00 dan jumlah aset tetap sebesar Rp716.182.528,00. Maka total aset Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp716.664.028. Pada pos kewajiban tidak terdapat beban utang yang ditanggung oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau, jumlah ekuitas Rp716.664.028,00, maka total kewajiban dan ekuitas dana Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp716.664.028,00.

Laporan Operasional

Pada Tahun Anggaran 2017, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau telah menyajikan laporan operasional. Berdasarkan laporan tersebut diketahui beban yang dilaporkan sebesar Rp2.694.003.681,00, yang terdiri dari: Beban Pegawai – LO Rp939.621.937,00, Beban Barang dan Jasa Rp1.626.930.479,00 serta Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp127.451.265,00. Jika dibandingkan dengan jumlah beban pada Tahun 2016 yaitu Rp3.095.136.809,00, terdapat penurunan sebesar Rp401.133.128,00 atau 12,96%.

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau menyajikan laporan operasional tersebut sesuai dengan Permendagri No.64 Tahun 2013, dimana disajikan kelompok pos kegiatan operasional (meliputi pos-pos pendapatan-LO dan beban) dan kegiatan non operasional serta pos luar biasa.

2. Laporan Perubahan Ekuitas

Dari laporan perubahan ekuitas pada Tahun 2017 diketahui bahwa jumlah ekuitas awal sebesar Rp864.158.774,00 merupakan saldo ekuitas dana Tahun 2016. Penambahan/pengurangan ekuitas bersumber dari saldo surplus/defisit-LO pada akhir periode pelaporan senilai Rp2.694.003.681,00 dan koreksi ekuitas lainnya senilai Rp36.578.581,00, dan pada akhir periode ekuitas akhir sejumlah Rp716.664.028,00.

3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan yang disajikan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau pada Tahun Anggaran 2017 telah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berdasarkan Permendagri No.64 Tahun 2013. Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi-informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Pembahasan

1. Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017 disusun mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (Permendagri No.64 Tahun 2013) dimana terdapat 5 komponen laporan keuangan pokok yang wajib disediakan setiap SKPD diantaranya: Laporan Realisasi Anggaran (LRA),

Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitasi (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Khusus untuk Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) dan Laporan Arus Kas (LAK) hanya dibuat oleh unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Demikian pula untuk Tahun 2016, komponen laporan keuangan pokok yang disediakan oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau yaitu: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitasi (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berdasarkan pada Permendagri No.64 Tahun 2013.

2. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau Tahun 2017 adalah kas menuju akrual (*cash toward accrual*). Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk pengakuan pendapatan-LRA dan belanja yang diatur dalam Permendagri No.64 Tahun 2013, berbasis kas (*cash basis*). Sedangkan pengakuan Neraca, LO dan LPE berbasis akrual (*accrual basis*) yang diatur dalam Permendagri No.64 Tahun 2013.

3. Komponen Laporan Keuangan

Dalam laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas yang dibuat oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau Tahun 2017 menam-pilkan kolom saldo Tahun 2017 dan Tahun 2016, sehingga ada perbandingan presentase kenaikan/penurunan antara Tahun 2016 dengan Tahun 2017. Dalam PP No. 71/2010 keterkaitan LRA dengan LO, rekening pendapatan dibedakan antara pendapatan-LRA dengan Pendapatan-

LO demikian juga untuk belanja dibedakan antara rekening belanja dengan rekening beban. Dalam laporan realisasi anggaran penge-lompokan belanja tidak langsung dan belanja langsung, dalam Permendagri No.64 Tahun 2013 ditiadakan dan diganti menjadi kelompok belanja operasi, belanja modal (sebelumnya masuk kelompok belanja langsung) dan belanja tak terduga (sebelumnya masuk kelompok belanja tidak langsung).

Maka dapat disimpulkan bahwa menolak hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu: Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau dalam menyajikan Laporan Keuangan Daerah belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Permendagri No.64 Tahun 2013.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyajian laporan keuangan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau telah sesuai berdasarkan Permendagri No.64 Tahun 2013. Komponen dari penyajian laporan Keuangan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Laporan keuangan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau memakai basis akuntansi *cash toward accrual* dimana laporan realisasi anggaran berbasis kas dan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan neraca berbasis akrual.

3. Menolak hipotesis yang telah diajukan, karena Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau menyajikan Laporan Keuangan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Permendagri No.64 Tahun 2013.

B. Saran

1. Kiranya untuk tahun anggaran selanjutnya Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau disarankan dapat menyajikan laporan keuangan berbasis akrual (accrual basis) sepenuhnya yang tercantum dalam Permendagri No.64 Tahun 2013.
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten dalam bidang laporan keuangan, sehingga mampu bekerja dengan baik dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Berau.
3. Selain itu untuk penelitian selanjutnya agar dapat melakukan penelitian pada beberapa dinas-dinas lain agar dapat meng-gambarkan secara umum dan luas mengenai penyajian laporan keuangan.

4. DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2005. *Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.

_____. 2005. *Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah*. Jakarta.

_____. 2012. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Departemen Agama RI, Jakarta.

_____. 2012. *Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Fokus media, Bandung.

_____. 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah*. Fokusmedia, Bandung.

Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*, Edisi Ketiga. Erlangga, Jakarta.

Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2009. *Standar Akuntansi Pemerintahan*, Edisi Pertama. BPFE, Yogyakarta.

Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Edisi Kedua. Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN, Yogyakarta.

Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 16 No. 04 Tahun 2016.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset, Yogyakarta.

Ningtyas, Rina Eka. 2011. *Pengaruh Islam dalam perkembangan akuntansi*. <https://www.scribd.com/doc/48861488/Pengaruh-Islam-dalam-perkembangan-akuntansi>, uploads 15 Februari 2011. Diakses pada tanggal 23 Mei 2018.

Pontoh, Winston. 2013. *Akuntansi Konsep dan Aplikasi*. Halaman Moeka, Jakarta.

Rodiansyah. 2017. *Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau*. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Tanjung Redeb, Berau.

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.